

PERAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MASYARAKAT DAN DEMOKRASI

Aprilia, D. M.¹, Rahadian, R. P.², Hasibuan, A. N³, Prayogi, R A⁴

*Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya, Jalan Ketintang
No. 156, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*

Email

dindamaya@student.telkomuniversity.ac.id

radinka@student.telkomuniversity.ac.id

yogikvixiloc@student.telkomuniversity.ac.id

ahmadnaufalhsb@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak: Hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan dan demokrasi adalah aspek dasar dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab serta sebagai salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, yang sudah diatur oleh negara dalam UUD 1945. Hak-hak individu mencakup hak sosial, politik, ekonomi, dan sipil adalah segala hal yang harus dipenuhi negara agar dapat menciptakan masyarakat yang terstruktur dan akur sehingga kesatuan Indonesia bisa tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memenuhi kewajibannya kepada negara, seperti kewajiban konstitusional, politik, dan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepada warga negara tidak disalahgunakan atau diabaikan. Dengan memahami dan menghormati hubungan yang kompleks antara hak dan kewajiban, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: hak, kewajiban dan kewajiban warga negara Indonesia

Abstract: Rights and obligations in the context of citizenship and democracy are basic aspects in the formation of a just and civilized society and as a form of practice of Pancasila, which has been regulated by the state in the 1945 Constitution. Individual rights including social, political, economic and civil rights are all things that must be fulfilled by the state in order to create a structured and harmonious society so that the unity of Indonesia can be maintained. On the other hand, people also need to fulfill their obligations to the state, such as constitutional, political and social obligations. The government has the responsibility to protect the rights of individuals and ensure that the obligations mandated to citizens are not abused or neglected. By understanding

and respecting the complex relationship between rights and obligations, society can build a strong foundation for an inclusive, equitable and sustainable democracy.

Keywords: *rights, duties and obligations of Indonesian citizens*

1. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat dan demokrasi. Mereka merupakan dua sisi dari sebuah koin yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Hak-hak individu memberikan landasan untuk kebebasan individu seperti hak berbicara, beragama, berserikat, dan hak atas keadilan adalah hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.

Disisi lain, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh masyarakat dan negara adalah wujud dari komitmen individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan menjaga keadilan sosial. Selain itu, hak dan kewajiban juga memerankan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara individu memberikan individu dan kepentingan kolektif. Hak-hak individu memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki nilai yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara, sementara kewajiban-kewajiban memastikan bahwa kebebasan individu tidak bertentangan dengan kepentingan bersama.

Dalam konteks demokrasi, hak dan kewajiban menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan sistem. Hak-hak politik, seperti hak memilih dan dipilih, memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, sementara kewajiban, seperti membayar pajak atau menjalankan

kewajiban sipil, membentuk dasar kontrak sosial antara individu dan negara.

Melalui analisis ini kita dapat mengetahui peran hak dan kewajiban dalam masyarakat dan demokrasi, mengetahui apa saja hak yang dimiliki setiap individu, apa saja kewajiban yang harus di patuhi oleh setiap individu dan mengerti peran hak dan kewajiban dalam menjaga harmoni dan kesatuan dalam yang terdiri dari berbagai kelompok.

Dengan demikian peran hak dan kewajiban dalam masyarakat dan demokrasi adalah untuk menciptakan suatu sistem yang adil, inklusif dan berkelanjutan dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara positif.

2. LANDASAN TEORI

1. HAK

Dalam filsafat politik, konsep hak dan kewajiban merupakan dua prinsip fundamental yang membentuk dasar dari hubungan antara individu dan pemerintah atau masyarakat secara umum. Hak adalah klaim moral atau legal atas sesuatu yang diberikan kepada individu karena status atau keberadaannya sebagai manusia, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial.

Hak mencakup berbagai perspektif filosofi, hukum dan sosial yang membentuk pemahaman tentang hak-hak individu. Maka dari itu banyak teori yang membahas tentang hak-hak individu berikut beberapa teori yang

sangat relevan. Teori marxis, dalam pandangan marxis hak-hak individu di pahami dalam konteks struktur sosial dan ekonomi, marxis percaya bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang ada mempengaruhi tindakan dan keputusan individu. Teori naturalis atau alami, teori ini berpendapat bahwa hak-hak individu merupakan hak-hak yang melekat pada manusia secara alami, independen dari konvensi sosial atau hukum.

Selain keadilan, etika juga menekankan pada gagasan kebaikan yang menekankan pada keadilan dan juga pentingnya masyarakat bertindak demi kebaikan bersama dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini memerlukan pertimbangan dampak tindakan kita terhadap masyarakat secara keseluruhan dan mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran dan empati.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah suatu tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai aturan, norma atau hukum yang berlaku. Dalam konteks sosial, politik dan hukum kewajiban mengacu pada serangkaian tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok untuk menjaga ketertiban, keadilan dan keberlangsungan masyarakat.

Dalam teori kontrak sosial berpendapat bahwa individu memiliki kewajiban mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam kontrak sosial. Dalam pandangan ini, kewajiban merupakan bagian dari kesepakatan sosial yang membentuk dasar bagi struktur sosial dan politik.

Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dan berpartisipasi

dalam proses politik. Hak ini juga disertai dengan kewajiban untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana dan mematuhi hukum yang berlaku. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu, seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, sementara juga bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di masyarakat. Dalam konteks ini, konsep hak dan kewajiban membentuk kerangka kerja yang penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem politik dan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian Deskriptif analitis dan juga metode penelitian Komparatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data,

menyusun,

mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikannya (Achmadi & Narbuko, 2015). metode analisis kausalitas digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dengan stabilitas sosial dan keberhasilan demokrasi. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hak dan kewajiban individu berinteraksi dalam membentuk dinamika sosial dan politik dalam masyarakat yang demokratis.

4. PEMBAHASAN

1. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM FILSAFAT POLITIK

Dalam filsafat politik, hubungan antara hak dan kewajiban sering kali dijelaskan sebagai kontrak

sosial, di mana individu memberikan kepatuhan kepada pemerintah dalam pertukaran untuk perlindungan hak-hak dasar mereka. Konsep ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Konsep hak dan kewajiban dalam filsafat politik membentuk dasar etis yang mendasari hubungan antara individu dan negara dalam masyarakat. Hak-hak individu, yang sering kali dipandang sebagai kebebasan atau hak yang melekat pada manusia, memberikan landasan moral untuk menuntut perlindungan dan pengakuan dari pemerintah atau otoritas politik. Di sisi lain, kewajiban merupakan tanggung jawab yang dimiliki individu terhadap masyarakat atau negara, yang memerlukan partisipasi aktif dalam proses politik, pemenuhan hukum, dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

2. JENIS-JENIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 berikut beberapa point yang disebutkan :

a. Hak atas kewarganegaraan

Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas hak warga negara untuk status kewarganegaraannya. Menurut pasal tersebut, warga negara Indonesia adalah orang-orang yang asli dari bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, penduduk Indonesia meliputi warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, yang merupakan landasan utama kehidupan politik di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 26 ini memberikan jaminan bahwa hak warga negara untuk status kewarganegaraannya dilindungi dan tidak dapat dicabut secara semena-mena.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Pasal 27 Ayat (1) Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di antara warga negara dalam hal hak dan kewajiban mereka. Pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk kedudukan yang sama dalam hukum, sementara juga menegaskan kewajiban mereka untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, kesetaraan ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam masyarakat yang demokratis.

c. Kesejahteraan sosial

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan semangat untuk

mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal ini terdiri atas empat ayat yang memberikan ketentuan mengenai perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin, anak-anak terlantar, serta seluruh rakyat yang lemah dan tidak mampu. Selain itu, pasal ini juga menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi seluruh rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Pasal 34 memancarkan semangat keadilan sosial yang berlandaskan martabat kemanusiaan, memberikan jaminan hak-hak kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

d. Hak mendapat pendidikan

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak dan kewajiban warga negara terkait dengan pendidikan. Ayat (1) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara Ayat (2) menegaskan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya, Ayat (3) menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, Pasal 31 Undang-Undang Dasar menggariskan prinsip-prinsip penting dalam mencapai

tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

e. Kewajiban pajak

Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah untuk mendukung pengeluaran publik dan layanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

f. Kewajiban menghormati hak orang lain

Warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak individu lainnya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam kebebasan dan keamanan orang lain dalam masyarakat.

3. KESEIMBANGAN DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa keseimbangan ini, masyarakat dapat mengalami ketidakadilan dan konflik. Beberapa cara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara antara lain:

a. Pendidikan: Pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh warga negara dapat membantu memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Pendidikan ini juga dapat membantu membentuk kesadaran akan pentingnya

menggunakan hak dengan bijaksana dan memenuhi kewajiban dengan tanggung jawab.

- b. Penegakan hukum yang adil: Sistem hukum yang adil dan efektif merupakan landasan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Penegakan hukum yang tidak memihak dan tidak diskriminatif akan memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi kewajiban mereka tanpa penindasan atau penyalahgunaan.
- c. Partisipasi dalam proses politik: Memiliki akses yang adil dan setara dalam proses politik memungkinkan warga negara untuk melaksanakan hak politik mereka dengan efektif. Partisipasi ini juga membantu dalam membangun kesadaran akan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.
- d. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah: Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan kewajiban pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dipenuhi. Ini membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam

distribusi sumber daya dan kesempatan.

4. PERAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MASYARAKAT DAN DEMOKERASI

Hak dan kewajiban memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat dan dalam konteks demokrasi. Beberapa peran utama dari hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi kebebasan individu: Hak-hak individu melindungi kebebasan dan martabat manusia dari campur tangan yang tidak sah dari pihak lain, termasuk pemerintah. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat.
- b. Memungkinkan partisipasi politik: Hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan membuat keputusan yang memengaruhi masyarakat mereka.
- c. Mendorong tanggung jawab sosial: Kewajiban-kewajiban warga negara, seperti membayar pajak dan menghormati hak orang lain, membantu membangun tanggung jawab sosial dan

solidaritas di antara warga negara.

- d. Mempertahankan demokrasi:
Hak dan kewajiban merupakan pondasi demokrasi yang sehat. Dengan menggunakan hak mereka dengan bijaksana dan memenuhi kewajiban mereka dengan tanggung jawab, warga negara berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan sistem demokratis yang kuat dan inklusif.

5. KESIMPULAN

Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban dalam filsafat politik tidak hanya membentuk dasar hubungan antara individu dan pemerintah, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan

masyarakat yang adil dan demokratis. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua prinsip fundamental dalam filsafat politik yang membentuk dasar hubungan antara individu dan pemerintah atau masyarakat secara umum.

Hak-hak warga negara mencakup beragam aspek, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, sementara kewajiban-kewajiban warga negara termasuk pematuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses politik, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, sementara pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban tersebut menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Wirda, Yasmin (2016). "Kontrak Sosial

Shidarta. (2022). "Hak dan Kewajiban" [PDF].
Diakses dari: Hak dan Kewajiban
(https://www.researchgate.net/publication/356713120_Hak_dan_Kewajiban).

Pinter Hukum. (2024). "Pengertian hak dan kewajiban, Lengkap!" Diakses dari: Pengertian hak dan kewajiban, Lengkap!
(<https://pinterhukum.or.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-lengkap>).

PKN IPS. (2015, November). "Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara." Diakses dari: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara
(<https://pkn-ips.blogspot.com/2015/11/jenis-jenis-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>).

"8 Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945." (tidak ada tahun). BOBO.ID.
Diakses dari: 8 Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
(<https://bobo.grid.id/read/083610956/8-jenis-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-yang-diatur-dalam-undang-undang-dasar-1945>).

"Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." (2018).
Diakses dari: Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
(<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5>)

Ardi, Alifia, Damara, Fathul, Nicko, Verdy,